

FAKTOR PENOLAKAN MASYARAKAT PRIBUMI PADA KEPEMIMPINAN PENDATANG PADA PILKADA KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015

EMY PRATIWI UTAMI

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: emyutami59@gmail.com

Abstrak

Pilkada pertama kali dalam pemilihan gubernur ini mendapatkan hal yang tidak biasa terjadi dalam pemilukada lainnya, karena setelah proses pemungutan suara berlangsung dan kemudian melakukan perhitungan suara yang di peroleh antar Cagub-Cawagub muncul ganjalan kepada pihak yang kalah. Pihak yang kalah menuntut secara langsung kepada KPU. Pada akhirnya pihak yang kalah berakibat pada unjuk rasa, awalnya unjuk rasa berlangsung dalam kondisi hukum namun pada akhirnya terjadi kerusuhan yang membuat mobil dinas dari gubernur dibakar bahkan massa membakar kantor gubernur. Hal ini sangat fatal di lakukan karena fasilitas umum menjadi rusak parah dan tidak bisa di gunakan dalam waktu yang dekat. Dan penyebab dari Faktor penolakan pendukung dari massa pribumi karena adanya yang pertama, pendatang tidak mengetahui banyak hal mengenai daerah tersebut. Kedua, bukan dari orang pribumi asli dari Kalimantan Utara sehingga dari pihak pribumi mengatakan tidak diperbolehkan menjadi kepala daerah di Kalimantan Utara. Ketiga, adanya indikasi *money politic* yang menyebabkan kecurangan dari pilkada di Kalimantan Utara pada tahun 2015.

Kata kunci:Gerakan Penolakan, Pribumi, Pilkada

PENDAHULUAN

Pemimpin merupakan figur yang terpenting ada disuatu daerah maka bawahan akan mengikuti cara pemimpin bekerja, sangat aneh jika terjadi pemimpin yang tidak dipanuti oleh bawahan maupun masyarakat yang ada disuatu daerah tersebut, dalam hal ini pemimpin harus dipilih yang bisa membuat suatu daerah merasa menjadi lebih maju. Seorang pemimpin adalah seorang nahkoda disuatu kapal, sehingga kemanapun kapal tersebut mencapai tujuannya

tentu ditentukan oleh pemimpinnya. Dalam konteks demokrasi lokal, pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum kepala daerah harus dilaksanakan dengan jujur, adil dan damai. Salah satunya prinsip yang terpenting adalah pengakuan dari perbedaan dan penyelesaian secara damai. Pada tahun 2015 adalah PEMILUKADA gubernur yang pertamakali di lakukan di Kalimantan Utara, karena pada tahun 2014 baru saja di bentuk

provinsi terbaru ini. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan pada periode 2015-2020 yang berjumlah 9 partai yakni dari Partai HANURA, Partai NASDEM, PKB, PKPI, PDI-P, PKS, PAN, Partai Demokrat, dan PBB. Pemilihan Kalimantan Utara pada tahun 2015 ini dihelat di lima daerah, yakni Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan dan Tana Tidung. Pemilihan diikuti oleh dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Jusuf SK-Marthin Billa dan Irianto Lambrie-Udin. Berdasarkan rekapitulasi penghitungan cepat yang dilakukan kubu tim pasangan tersebut, perolehan suara Irianto-Udin mencapai 53,67% suara. Sementara, kubu pasangan Jusuf SK-Marthin Billa mengumpulkan 45,86% suara. (Sindonews.com/Awaluddin Jalil). Namun dalam berlangsungnya pesta demokrasi pertama kali dalam pemilihan gubernur ini mendapatkan hal yang tidak biasa terjadi dalam pemilihan lain nya, karena setelah proses pemungutan suara berlangsung dan kemudian melakukan perhitungan suara yang di peroleh antar Cagub-Cawagub muncul ganjalan kepada pihak yang kalah. Pihak kalah adalah dari

pihak pribumi, dimana dinyatakan kalah dalam pesta demokrasi ini dan mengaku adanya kecurangan atas penghitungan suara tersebut. Massa pendukung dari pribumi menolak atas kekalahan yang dialami dan melakukan unjuk rasa dengan menuntut secara langsung kepada KPU. Pada akhirnya pihak yang kalah berakibat pada unjuk rasa, awalnya unjuk rasa berlangsung dalam kondisi hukum namun pada akhirnya terjadi kerusuhan yang membuat mobil dinas dari gubernur dibakar bahkan massa membakar kantor gubernur. Dilakukan unjuk rasa penolakan dikarenakan tidak menerima adanya kepemimpinan dari non pribumi tersebut. Massa dari pendukung pribumi mengatakan bahwa seharusnya yang menjadi kepala daerah adalah putera daerah asli yang mengerti dengan daerahnya sendiri, namun kenyataannya yang terpilih adalah dari figur pendatang. Dan massa pendukung dari pihak pribumi mengatakan adanya kecurangan yang diakibatkan *money politic*. Unjuk rasa menolak penetapan pasangan calon gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie-Udin Hianggio oleh KPU setempat,

berakhir anarkis. Massa pendukung pasangan yang kalah, Jusuf SK-Marthin Billa, merusak dan membakar bangunan Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Kaltara. Dua unit mobil dibakar. (TribunKaltim.co/Budi Susilo). Dalam politik tidak ada kawan yang abadi, tetapi yang ada adalah kepentingan yang abadi. Sebagaimana kita ketahui, jabatan gubernur mempunyai kekuasaan yang besar baik di bidang politik, pemerintahan, hukum, administrasi maupun ekonomi. Oleh karena itu, jabatan ini di perebutkan oleh pihak-pihak tertentu dengan melupakan arti kemanusiaan, nasionalisme, cinta kasih dan lain-lain yang di anjurkan oleh agama, bahkan sentimen agama ikut mewarnai perpolitikan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode deskriptif kualitatif yaitu melukiskan keadaan di lapangan apa adanya sebagaimana di nyatakan oleh Suharsimi Arikunto sebagai berikut :

“Deskriptif adalah menyelidiki sesuatu keadaan, kondisi, situasi dan peristiwa ataupun hal lainnya, yang hasilnya akan di paparkan dalam sebuah laporan

penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang paling mudah atau disebut penelitian sederhana di bandingkan dengan penelitian lainnya. Karena dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan apa-apa dalam objek atau wilayah yang diteliti. Dalam penelitian ini bermaksud bahwa peneliti tidak menambah, mengubah atau mengadakan manipulasi pada objek atau wilayah yang diteliti, kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan secara apa adanya tanpa dilebihkan.”

Kemudian penulis melakukan penelitian di Provinsi Kalimantan Utara dan tepatnya di Kabupaten Bulungan. Pengumpulan data penulis menggunakan data sekunder dan primer dimana penulis mengambil Data yang diperoleh dari pihak pertama yang sifatnya cenderung lebih subyektif karena bersifat pendapat pribadi yang dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara oleh peneliti yang dimaksud dengan data primer kemudian Data yang dikumpulkan oleh peneliti yang sifatnya cenderung lebih obyektif karena sudah diolah oleh pihak ketiga, yang dikumpulkan oleh peneliti dari jurnal, monografi setempat, skripsi, tesis, desertasi dan lain-lain yang dimaksud dengan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data penulis menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan

responden. Penulis menggunakan kuesioner karena setiap jawaban pertanyaan tidak diberikan nominal, tetapi penulis menghitung berapa banyak responden memilih tingkat jawaban tertentu untuk kemudian dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor terjadinya Penolakan Masyarakat Pribumi pada Kepemimpinan Pendetang Pada Pilkada Kalimantan Utara

1. Perebutan Kekuasaan

Konteks ini menggunakan teori dari French dan Bertram Raven, dalam hal perebutan kekuasaan menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan paksaan hanya sebanyak 54% yang mengatakan biasa saja artinya adalah munculnya kemarahan sesudah penghitungan suara, karena mereka yang merasa menang ternyata malahan kalah. Sedangkan mereka yang merasa kalah malahan tidak ada tetapi malahan berpesta pora dan menyakitkan hati lawan politiknya. Ada 0,9% yang mengatakan bahwa kekuatan paksaan sangat tinggi, kemudian 21% tinggi sebaliknya 0,9% mengatakan rendah dan 0,4% sangat rendah. Kemudian menunjukkan bahwa 38% responden menyatakan bahwa bagi-bagi hadiah berbentuk uang atau barang cukup tinggi bahkan 16% menyatakan sangat tinggi

dengan demi menunjukkan kelompok yang memilih kelompok tertentu, pilihannya adalah pemberian, namun pada kesempatan lain ada responden 16% menyatakan bahwa pemberian adalah rendah. Apakah yang berkata demikian menunjukkan untuk maksud menutupi atau tidak mendapat pemberian apapun. Lalu menunjukkan bahwa penggunaan keabsahan sebanyak 0,5% yang mengatakan biasa saja artinya adalah dalam keabsahan dalam pemilukada tersebut para kandidat sudah sah persyaratan dalam menjadi calon dari pemilu. Namun ada juga responden sebanyak 38% menyatakan tinggi dalam kekuatan keabsahan tersebut. Dan juga menyatakan rendah hanya 04% artinya mengatakan bahwa tidak sah dalam mengikuti pemilu tersebut, kemudian adapun responden menyatakan sangat tinggi 07% dalam tingkat keabsahan tersebut. Selanjutnya menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan daya tarik pasangan calon sebanyak 07% menyatakan rendah, sedangkan yang menyatakan biasa saja adalah sebanyak 33% artinya tidak ada tertarik dalam pasangan calon tersebut. Kemudian yang menyatakan daya tariknya tinggi sebanyak 38% artinya responden kebanyakan menyatakan daya tarik tinggi. Dan adapula yang menyatakan sangat tinggi sebanyak 21% dalam tingkatan daya tarik tersebut. Terakhir menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan keahlian

mengatakan rendah sebanyak 07% artinya tidak memiliki keahlian dalam menjadi calon tersebut, selanjutnya yang menyatakan tinggi sebanyak 35% artinya banyak yang mengatakan tinggi dalam ahlinya. Dan yang menyatakan biasa saja sebanyak 42% berartikan kebanyakan keahliannya hanya biasa saja dan tidak terlihat memiliki keahlian. Dan kemudian yang menyatakan sangat tinggi hanya sebanyak 14% dalam tingkat keahlian tersebut.

2. Konflik

Dalam konteks ini menggunakan perbedaan pendapat dan untung dan rugi yaitu menunjukkan bahwa penggunaan terkait konflik dalam beda pendapat menunjukkan 11% biasa saja artinya tidak adanya beda pendapat yang mengarahkan dalam pemilu tersebut. Kemudian sangat tinggi sebanyak 30% yang artinya dalam beda pendapat ini sangat berpengaruh dalam pemilu ini, selanjutnya responden paling tinggi sebanyak 57% mengatakan tinggi dalam beda pendapat artinya besar pengaruhnya dalam berbeda pendapat ini. Namun rendah dan sangat rendah tidak ada yang menyatakan dalam berbeda pendapat ini. Dan menunjukkan bahwa penggunaan terkait konflik dalam mengakibatkan untung dan rugi menyatakan sangat rugi sebanyak 54% artinya dalam kejadian tersebut banyak terjadi kerugian berkaitan

dengan rusaknya infrastruktur Negara dan banyak mendapatkan kehilangan berkas atau dokumen penting yang ada dikantor tersebut. Hal ini responden nyatakan kebanyakan sangat rugi, kemudian sebanyak 11% menyatakan biasa saja artinya adalah tidak merasakan rugi dan untung, melainkan merasakan biasa saja. Selanjutnya yang menyatakan rugi sebanyak 26% dan 04% menyatakan untung artinya pihak satunya merasakan untung karena apa yang telah dilakukan telah terjadi dan 02% menyatakan sangat untung dalam kerusuhan tersebut.

3. Identitas

Dalam konteks ini menggunakan kesamaan suku, kesamaan agama, kesesuaian politik dan kesesuaian ekonomi. menunjukkan bahwa penggunaan terkait identitas yang mengakibatkan kesamaan suku menyatakan 07% rendah karena tidak adanya politik identitas di Provinsi Kalimantan Utara ini, namun 45% menyatakan sangat tinggi artinya politik identitas terkait kesamaan suku sangat kental adanya dan mengakibatkan kerusuhan. Kemudian adapun 26% menyatakan tinggi. Selanjutnya 21% menyatakan biasa saja artinya di Kalimantan Utara terkait politik identitas tidak bermasalah atau artinya tidak adanya kerusuhan mengakibatkan kecintaan

sesama suku. Kemudian menunjukkan bahwa penggunaan terkait identitas yang mengakibatkan kesamaan agama menyatakan 04% rendah artinya tidak ada isu terkait mengenai agama dalam pemilu ini, namun 40% mengatakan sangat tinggi dalam hal agama dalam pemilu ini diakibatkan adanya isu-isu yang berkaitan dengan agama seperti memilih sesuai agamanya saja. Kemudian 38% menyatakan tinggi dalam hal agama. Dan 16% menyatakan dalam hal agama biasa saja, tidak adanya isu terkait kesamaan agama tersebut. Dan menunjukkan bahwa penggunaan terkait identitas yang mengakibatkan kesesuaian politik menyatakan 26% biasa saja artinya tidak adanya kesesuaian politik dalam pemilu ini, namun 52% menyatakan tinggi hal ini dikarenakan dari pasangan calon tersebut sudah berpengalaman dalam hal politik, maka tidak ada hal ragu ketika mereka mencalonkan diri. Kemudian 07% menyatakan sangat tinggi. Selanjutnya 02% menyatakan sangat rendah artinya tidak adanya juga kesesuaian politik. Dan 11% menyatakan rendah karena dalam hal ini kesesuaian politik di pemilu ini tidak terlalu berpengaruh. Dan yang terakhir menunjukkan bahwa penggunaan terkait identitas yang mengakibatkan kesesuaian ekonomi menyatakan 52% biasa saja artinya tidak adanya isu terkait ekonomi dan sesuai ekonomi. Namun 35%

menyatakan tinggi artinya bahwa setiap calon pasangan yang ingin menjadi calon pasti memiliki ekonomi yang kuat dan lancar. Kemudian 09% mengatakan sangat tinggi. Dan 02% menyatakan rendah artinya satu orang berkata kesesuaian ekonomi dalam pemilu tidak begitu berpengaruh atau tidak ada kaitannya dalam hal pemilu ini.

Selanjutnya penulis sampaikan pembahasan sebagai implikasi dari analisis tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Perebutan kekuasaan memakai kekuatan paksaan menyatakan biasa saja, dikarenakan kebanyakan masyarakat memilih sesuai ras dan agama. Tanpa adanya paksaan dari luar untuk memilih pasangan calon. Selanjutnya kekuatan pemberian menyatakan tinggi, dikarenakan sudah menjadi kebiasaan dalam memberikan uang dan hadiah guna untuk dapat memilih calon tersebut. Dan yang memberikan adalah dari tim sukses masing-masing pasangan calon. Kemudian kekuatan keabsahan menyatakan biasa saja, dikarenakan ketika calon telah berkeinginan untuk mencalonkan diri maka harus

mengikuti syarat dan ketika telah dinyatakan SAH, artinya telah berhak mencalonkan diri. Selanjutnya lagi kekuatan dalam daya Tarik menyatakan tinggi dikarenakan banyaknya masyarakat yang tertarik dengan visi dan misi masing-masing dari pasangan calon. Karena visi dan misi yang sangat kuat untuk meyakinkan masyarakat Kalimantan Utara. Dan yang terakhir kekuatan keahlian dinyatakan biasa saja. Karena masing-masing calon sudah memiliki pengalaman dibidang politik maupun birokrasi. Hal ini menyebabkan biasa saja.

2. Konflik yang mengakibatkan beda pendapat menyatakan tinggi karena visi dan misi yang berbeda, strategi yang berbeda untuk memajukan Kalimantan Utara tersebut. Dan terjadinya konflik tersebut karena hal beda pendapat antara tim sukses pasangan calon. Kemudian konflik yang mengakibatkan untung dan rugi dalam pemilukada tahun 2015 ini menyatakan sangat rugi karena mengakibatkan rusaknya infrastruktur Negara, banyak

motor dan juga mobil milik pribadi maupun Negara ikut terbakar. Dan mengalami banyak kerugian,hal ini karena terjadinya demo akibat tidak menerima hasil dari pemungutan suara yang berakhir anarkis.

3. Identitas yang mengakibatkan kesamaan suku menyatakan sangat tinggi dikarenakan dalam pemilukada ini pemilih hanya memilih berdasarkan sesame suku saja dan begitu juga dengan kesamaan agama hanya memilih sesuai agama saja dan yang mengakibatkan kesesuaian politik tinggi dikarenakan memiliki pengalaman didunia politik yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam politik tidak ada persahabatan yang abadi,tetapi yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Dan karena suku, ras, golongan, agama, kepercayaan, almamater merupakan kepentingan. Maka suatu ketika akan terbentuk kepentingan satu golongan, inilah yang menjadi penyebab bentrok, karena memiliki nilai yang berbeda. Oleh karena itu jangan

menyalahkan orang lain dan kelompok lain. Kemudian yang mengakibatkan kesesuaian ekonomi biasa saja, dikarenakan dalam hal ekonomi berjalan dengan baik, tidak adanya kendala mengenai ekonomi.

4. KPU selama ini belum maksimal untuk mengantisipasi kemungkinan pecahnya konflik, andai kata KPUD mampu memprediksi kemungkinan ke depan maka selayaknya KPUD menceramahkan nasionalisme, karena bagaimanapun pilkada di Kalimantan Utara adalah untuk membangun bangsa dan negara secara utuh dan berkesinambungan maupun menjadi lebih baik.
5. Faktor penolakan pendukung dari massa pribumi karena adanya yang pertama, pendatang tidak mengetahui banyak hal mengenai daerah tersebut. Kedua, bukan dari orang pribumi asli dari Kalimantan Utara sehingga dari pihak pribumi mengatakan tidak diperbolehkan menjadi kepala daerah di Kalimantan

Utara. Ketiga, adanya indikasi *money politic* yang menyebabkan kecurangan dari pilkada di Kalimantan Utara pada tahun 2015.

KESIMPULAN

Faktor yang menyebabkan penolakan kepemimpinan tersebut karena Banyaknya masyarakat pribumi yang memilih sesuai ras, agama dan daya Tarik visi, misi yang lebih kuat menjadi faktor masing-masing pasangan calon sehingga rasa tidak terima pribumi terhadap kekalahan yang menyebabkan konflik. Dan adanya kurang yakin bahwa pemimpin dari figur pendatang tidak bisa memberikan kemakmuran pada masyarakat pribumi. Dan Cara memunculkan nasionalisme di Provinsi baru yang bernama Kalimantan Utara ini adalah dengan memperbanyak penataran baik dalam bentuk pendidikan maupun keagamaan yang dilakukan kepada masyarakat. Dengan demikian mulai dari sekolah (SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi) sampai pada rumah ibadah (Gereja Khatolik, Gereja Protestan, Masjid, Musholla, Langgar, Kuil, Pura, Klenteng, dan Wihara).

DAFTAR PUSTAKA

Arfan, Muhammad. 2015. *Kronologis unjuk rasa anarkis berakhir pembakaran di komplek kantor gubernur Kaltara*.
<http://kaltim.tribunnews.com/2015/12/20/inilah-kronologis-unjuk-rasa-anarkis-berakhir-pembakaran-di-kompleks-kantor-gubernur-kaltara> diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 22.00

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Jalil, Awaluddin. 2015. *Ricuh Pilkada Kaltara Tututup Akhir Tahun 2015*.
<https://daerah.sindonews.com/read/1073617/174/ricuh-pilkada-kaltara-tutup-akhir-tahun-2015-1451557758> diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 21.00

Syafie, I. K. (2010). *Ilmu Politik*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.